



## Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Jambi Terhadap Kerjasama Internasional Daerah

Ahmad Baidawi<sup>1</sup>, Iswandi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Pemerinthan, Universitas Jambi, Indonesia

<sup>2</sup>Prodi Ilmu Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

<sup>1</sup>ahmad.baidawi@unja.ac.id

### **Keywords:**

Policy,  
International  
Cooperation,  
Regional  
Autonomy and  
Local  
Government.

### **Abstract**

*This study aims to analyze Jambi City government policies towards regional international cooperation and explain the authority of local governments in cooperating with foreign parties through international agreements in the context of the Unitary State of the Republic of Indonesia and to examine the implementation of international agreements made by local governments as a form of autonomy. area. This research was conducted using qualitative and normative juridical research methods. The type of data used consists of primary data, secondary data, tertiary data. Data collection was carried out through observation, interviews and literature study. All data collected were analyzed using qualitative descriptive methods. The results of the interim research show that the local government of the city of Jambi has carried out various international collaborations in various fields. However, the policies taken towards international cooperation have not been maximal. In addition, local governments are also given the authority to be able to carry out international cooperation with foreign parties. This international cooperation uses international treaty instruments. This collaboration aims to empower regional potential, improve public services, and improve the welfare of local communities, especially those in the city of Jambi. The purpose of this International Cooperation is to create opportunities for local communities to take part in taking part in the regional development process. One form of cooperation is through the sister city and sister province.*

### **Kata Kunci:**

Kebijakan, Kerja  
Sama  
Internasional,  
Otonomi Daerah,  
dan Pemerintah  
Daerah.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah Kota Jambi terhadap kerjasama internasional daerah serta menjelaskan kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan hubungan kerja sama dengan pihak luar negeri melalui perjanjian internasional dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengkaji pelaksanaan perjanjian internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai

---

wujud dari otonomi daerah. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer, data sekunder, data tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan, Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode dekriptif kualitatif. Hasil penelitian sementara menunjukkan bahwa pemerintah daerah kota jambi sudah melakukan berbagai kerjasama Internasional dalam berbagai bidang. Namun, kebijakan yang diambil terhadap kerjasama internasional tersebut belum maksimal. Selain itu, pemerintah daerah juga diberikan kewenangan untuk dapat melakukan kerja sama internasional dengan pihak luar negeri. Kerja sama internasional ini menggunakan instrumen perjanjian internasional. Kerja sama ini bertujuan untuk memberdayakan potensi daerah, meningkatkan pelayanan publik, dan mensejahterakan masyarakat daerah khususnya masyarakat daerah Kota Jambi. Tujuan dari Kerjasama Internasional ini agar dapat menciptakan kesempatan bagi masyarakat daerah untuk ikut andil mengambil peran dalam proses pembangunan daerah. Salah satu bentuk kerja sama adalah melalui sister city maupun sister province.

---

## **Pendahuluan**

Era globalisasi saat ini, banyak negara mengkaji kembali kebijakan ekonomi luar negerinya. Tidak hanya menyangkut soal kemakmuran rakyatnya, isu ekonomi dan perdagangan ini juga sangat penting karena terkait kepentingan berbagai aktor hubungan internasional yang saling bersaing (Winarno: 2014). Menyempitnya batas-batas teritorial negara bangsa (*Nation State*) membuat aliran modal dan barang semakin deras melintasi perbatasan negara. Kondisi ini mendorong untuk negara-negara untuk melakukan investasi di wilayah-wilayah baru yang lebih menjanjikan secara ekonomi.

Persaingan tajam sebagai dampak globalisasi sangat mempengaruhi sebuah tatanan ekonomi global. Proses globalisasi ini telah meningkatkan kadar hubungan interdependensi tidak saja antar negara, tetapi juga antar daerah di lain negara. Hal ini terlihat dengan terjadinya multisourcing dalam produk global dan memunculkan peluang bagi daerah untuk menjadi bagian dari produksi global. Setiap negara dan juga daerah harus dapat menciptakan tingkat efisiensi dan produktivitas paling optimal agar mempunyai daya saing tinggi di pasar global. Dalam hal ini pelaksanaan diplomasi multi jalur memerlukan koordinasi yang efektif agar tidak terjadi konflik kepentingan yang merugikan pencapaian kepentingan nasional. Koordinasi kebijakan secara tradisional

biasanya berujung pada sentralisasi kekuasaan yang pada gilirannya menjadi tidak efektif karena setiap pihak yang terkait hanya mementingkan dirinya sendiri (Esti Andayani: 2015). Karena itu yang lebih banyak harus didorong adalah mekanisme koordinasi melalui *policy network* yang bersinergi demi kepentingan nasional.

Setiap negara mempunyai strategi yang berbeda-beda dalam mengantisipasi tantangan persaingan yang semakin ketat di era globalisasi saat ini. Dalam situasi demikian, kemampuan Indonesia dalam berdiplomasi ekonomi menjadi hal yang sangat penting (Kemenlu: 2015-2019). Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah pusat menyadari bahwa diplomasi tidak bisa hanya bertumpu pada kekuatan negara saja, melainkan juga pada aktor-aktor hubungan internasional selain negara (*non-state actors*), dimana salah satunya adalah Pemerintah Daerah (Pemda). Keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan politik luar negeri secara keseluruhan dipengaruhi oleh kondisi dalam negeri. Keterlibatan pemerintah daerah (pemda) dalam sub sektor hubungan internasional dikenal dengan sebutan paradiplomasi (*paradiplomacy*). Peran pemerintah daerah sangat penting dalam bagian multi-jalur diplomasi (*multitrack diplomacy*) untuk mewujudkan salah satu tujuan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan berbangsa, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum.

Pemerintah Daerah saat ini dituntut untuk berperan aktif dalam mencari peluang kerjasama internasional, tidak saja demi kemajuan daerahnya tetapi juga bagi kepentingan nasional NKRI. Pemda menjadi mitra dalam diplomasi ekonomi, karena banyak kerja sama internasional yang melibatkan kepentingan daerah. Peran aktif Pemerintah daerah sebagai aktor internasional bagi perjuangan diplomasi ekonomi dimungkinkan dengan adanya dukungan kebijakan otonomi daerah, desentralisasi dan peraturan perundang-undangan saat ini.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 367 yang berbunyi:

#### Pasal 367

(1). Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Pertukaran budaya;

- c. Peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
  - d. Promosi potensi Daerah; dan
  - e. Kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Pusat.
- (3). Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Pasal 7 yang berbunyi:

#### Pasal 7

- (1). Presiden dapat menunjuk pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain untuk menyelenggarakan Hubungan Luar Negeri di bidang tertentu.
- (2). Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri.

Kedua peraturan perundangan diatas tersebut menggaris bawahi bahwa kerja sama Pemerintah Daerah (Pemda) dengan pihak luar negeri merupakan sebuah kebutuhan nasional, sehingga pemerintah daerah harus diperkuat perannya. Dalam melaksanakan kepentingan tersebut, Kementerian Luar Negeri bertindak sebagai koordinator penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan kebijakan politik luar negeri, sedangkan Pemda sebagai pelaku hubungan luar negeri.

Pelibatan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan luar negeri saat ini dimungkinkan dengan adanya transformasi model tata kelola pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi, Pemerintah Daerah di Indonesia dapat bergerak lebih cepat melakukan pembangunan dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh pemda masing-masing. Dengan hak kewenangan yang dimilikinya, Pemda juga dapat membuka akses kerjasama dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri, baik melalui kerjasama dalam bentuk

sister city/province maupun bentuk kerja sama lainnya.

Menurut Kepala Bagian Kerjasama Setda Kota Jambi Mariani Yanti, Ph.D terhadap Bentuk Kerjasama Internasional Daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi tidak perlu diragukan lagi. Hal itu menurutnya tidak terlepas dari kerja keras jajaran Pemerintah Kota Jambi yang dimotori Wali Kota Jambi Syarif Fasha dengan konsep *outward looking policy*. Kota Jambi saat ini tercatat sebagai salah satu daerah di Indonesia yang aktif dan memiliki hubungan kemitraan strategis dengan beberapa negara di dunia. Sebut saja seperti Singapura, China, Korsel, Denmark, dan Jerman, yang memiliki kemitraan strategis dan komprehensif bagi Kota Jambi. Kota Jambi juga tercatat aktif dalam beberapa organisasi internasional, seperti UCLG ASPAC dan ICLEI (Jambi Berita: 2018).

Berikut ini beberapa kerja sama Internasional yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi :

1. Berkerja sama dengan Pemerintah Jerman dalam penyiapan program pengelolaan sampah untuk menurunkan emisi Gas Rumah kaca untuk mengatasi pemanasan global dan perubahan iklim. Bantuan senilai 13,4 juta Euro dari Bank Pembangunan Jerman (KfW), bagi pembangunan sanitary landfill di lokasi TPA Talang Gulo.
2. Bekerjasama dengan *Asian Development Bank* (ADB), Kerjasama ini menghasilkan bantuan dana sebesar 625 Milyar Rupiah untuk pembangunan IPAL dengan *Sewerage System* yang ditempatkan di Kecamatan Jambi Timur.
3. Kerja sama pemerintah Kota Jambi dengan Singapura dalam kegiatan Basic English Training. Kegiatan ini diselenggarakan pemerintah Republik Singapura, melalui Singapore Cooperation Programme (SCP), di Kota Jambi. Pelatihan ini di buat untuk ASN, kerja sama kedua negara ini telah rutin dilakukan sejak tiga tahun terakhir. Demi meningkatkan mutu kompetensi serta merubah mindset ASN Jambi, ratusan ASN belajar ke Singapura dan mengikuti SCP secara gratis dan dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah Singapura.
4. Bantuan yang bersumber dari lembaga PBB UN Habitat atau United Nations Human Settlements Programme sebesar US\$ 98.950 untuk penataan kawasan kumuh di Kota Jambi. Sebelumnya UN Habitat telah menggelar konferensi di Indonesia, yakni Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk

Permukiman dan Pembangunan Berkelanjutan atau The Third of the Preparatory Committee for Habitat III (Prepcom 3 UN HABITAT III) yang diikuti oleh 193 negara. Tim dari UN Habitat juga telah mengunjungi beberapa daerah di Indonesia, termasuk memantau perkembangan permukiman di Kota Jambi dan hasil akhirnya Kota Jambi terseleksi dan mendapatkan bantuan dana.

Berdasarkan hasil pengamatan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Jambi terhadap Kerjasama Internasional Daerah serta hambatan dan tantangan yang kemudian dihadapi dalam Kerjasama Internasional daerah Kota Jambi, serta analisis konseptual terhadap penelitian yang diberi judul: “Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Jambi terhadap Kerjasama Internasional Daerah”.

## **Metode**

Penelitian ini membahas Kebijakan Pemerintah Kota Jambi terhadap Kerjasama Internasional serta hambatan dan tantangan yang kemungkinan akan dihadapi Pemerintah Kota Jambi dalam melakukan suatu kerjasama internasional. Rancangan atau desain penelitian ini dilihat dari pendekatan analisisnya maka Penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini yang lebih ditekankan adalah bagaimana prosesnya bukan semata-mata bagaimana hasilnya. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif menekankan analisisnya pada *quality*. Data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan utama penelitian kualitatif ini adalah menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, menyeluruh, rinci dan tuntas. Oleh sebab itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan, membandingkan, serta mencari benang merah antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **1. Kedudukan Paradiplomasi dalam Politik Luar Negeri Indonesia**

Paradiplomasi diyakini telah menjadi tuntutan kebutuhan daerah saat ini dalam pembangunan ekonomi dan pengembangan potensi daerahnya. Arus informasi, pergerakan modal dan migrasi manusia, membuat daerah-daerah baik provinsi maupun

kabupaten/kota tidak akan mampu mengelakkan diri dari pengaruh internasional sekaligus berhadapan dengan berbagai kesempatan mendapatkan sesuatu yang positif bagi kepentingan daerah sekaligus kepentingan nasional. Oleh karena itu, perlu ada konsep baru dalam pelaksanaan diplomasi Indonesia dimana kemampuan daerah kabupaten/kota harus diperkuat dalam pelaksanaan diplomasi. Tanggung jawab pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan oleh pemerintah, tentunya tidak hanya terletak di tangan pemerintah pusat saja. Pemerintah Pusat perlu bersinergi dengan para pemangku kepentingan terkait, termasuk dalam hal ini pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah di Indonesia sebagai salah satu *non-state actor* dalam hubungan internasional memanfaatkan paradiplomasi untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Adanya kebijakan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk lebih mandiri, tidak selalu bergantung pada pemerintah pusat. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya, termasuk dengan menjalin kerja sama dengan pihak luar negeri, baik yang berupa kerjasama pemanfaatan potensi alam maupun peningkatan kualitas manusia. Kerjasama ini dilakukan agar dapat memaksimalkan pendapatan asli daerah untuk melaksanakan pembangunan agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemda berupaya membuka kontak perdagangan dan misi budaya ke luar negeri, mengadakan perjanjian dan kerjasama dengan negara-negara asing maupun aktor internasional non-negara, berpartisipasi dalam jaringan kerjasama internasional. Umumnya tidak mendirikan perwakilan permanen, tetapi melakukannya secara ad hoc karena masih menganggap hubungan luar negeri adalah ranah pemerintah pusat.

Di samping faktor ekonomi, motivasi kedua terbesar dalam kerja sama paradiplomasi di Indonesia adalah kerja sama dalam bidang sosial dan budaya. Memperkenalkan keanekaragaman budaya Indonesia merupakan salah satu cara untuk menjalin kerja sama. Dimulai dengan pagelaran budaya selanjutnya kegiatan paradiplomasi akan lebih mudah dikembangkan, baik untuk kerjasama terkait upaya peningkatan SDM di bidang pendidikan, kesehatan, kepemudaan, wanita, olah raga dan seni, maupun kerjasama bidang ekonomi.

*Paradiplomacy* yang paling populer di Indonesia adalah kerja sama *sister city/sister province*. Konsep ini merupakan hubungan kerja sama kemitraan antara dua kota atau dua provinsi dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya. Permendagri No.

1 tahun 1992 menyebutkan bahwa kerjasama sister city adalah hubungan kerjasama kota bersaudara yang dilaksanakan antara Pemerintah Kota, pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota Administratif dengan Pemerintah Kota setingkat di luar negeri. Dalam perkembangannya terdapat persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan kerjasama model tersebut. Sebagaimana tercantum dalam Permendagri No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri, persyaratan ini meliputi persamaan kedudukan, memberikan manfaat dan saling menguntungkan, tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan perekonomian, menghormati kedaulatan NKRI, mempertahankan keberlanjutan lingkungan, mendukung keutamaan gender dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagi negara-negara berkembang kerjasama *sister city* atau *sister province* diharapkan dapat menjadi jembatan bagi terbentuknya pemahaman antar kebudayaan serta transfer teknologi dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Kemitraan bilateral tersebut diharapkan menjadi proses kerja sama alih teknologi dan informasi, bantuan pendanaan, peningkatan SDM untuk mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi. Hal ini dapat menjadi langkah efektif sepanjang kerja sama tersebut memiliki program kegiatan yang tetap dan terencana, baik mengenai bidang-bidang yang akan dikerjasamakan, tujuan yang ingin dicapai, konstruksi biaya masing-masing pihak, maupun mengenai lamanya waktu yang diperlukan bagi program kegiatan yang dikerjasamakan. Setiap pihak harus memiliki pemahaman yang sama atas potensi unggulan yang dapat dikerjasamakan.

Beberapa kota-kota besar di Indonesia yang sudah menjalin kerjasama *Sister City/Sister Provincy*, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menjalin kerja sama sister province dengan Provinsi Fes-Boulmane di Maroko sejak 2014, Negara Bagian Bavaria Bayern di Jerman tahun dan dengan Prefecture Kagawa Jepang di tahun 2010. Pemerintah Provinsi Sumatra Barat berharap melalui kerjasama tersebut akan terjadi kerja sama perdagangan, investasi di bidang pariwisata, budaya, pendidikan, pertanian, peternakan dan perikanan serta energi terbarukan.

Selain Provinsi Sumatra Barat, kota Bukit Tinggi di Provinsi Sumatera Barat juga melakukan sister city dengan kota Seremban di Negeri Sembilan Malaysia. Ini merupakan kerja sama tipe transborder paradiplomacy. Hubungan antara dua kota tersebut ditandatangani tanggal 6 Desember 1986. Kedua kota sekalipun memiliki kondisi

geografis yang berbeda, kerja sama tetap dilakukan karena hubungan sejarah dan kebudayaan yang telah lama terjalin di antara mereka.

Berdasarkan gambaran praktik paradiplomasi di atas, kerja sama sister province/city yang ditandatangani oleh pemerintah daerah di Indonesia dengan mitra-mitranya di luar negeri dapat menjadi efektif atau tidak sangat bergantung pada proses “*matchmaking*” di awal kegiatan. Tanpa mitra yang tepat kerjasama tersebut tidak akan efektif, karena tidak mempunyai fokus yang jelas mengenai tujuan kerjasama. Proses “*matchmaking*” yang tidak tepat tersebut dapat terjadi karena proses yang dilalui tidak melalui analisis mendalam. Terkadang pula terjadi pembuatan MoU yang sifatnya tergesa-gesa, karena mengejar rencana kunjungan pejabat tingkat tinggi. Analisis kebutuhan, keunggulan, kelemahan dan komplementaritas dari kerjasama yang akan dilakukan pun seringkali menjadi terlewatkan. Akibatnya, pasca penandatanganan MoU, kerja sama yang terlihat bagus di atas kertas tidak dapat terwujud atau tidak efektif. Sektor yang akan dikerjasamakan bukan merupakan unggulan dan komplementaritas yang dibutuhkan daerah. Kedua pihak tidak memiliki fokus yang sama pada bidang yang akan dikerjasamakan karena tidak memahami kebutuhan, potensi, persamaan dan komplementaritas sektor-sektor yang akan dikerjasamakan serta keunggulan masing-masing daerah. Selain itu pemberdayaan daerah perlu dilakukan terhadap semua komponen, yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta sehingga target kerja sama yang telah difokuskan dapat tercapai. Tanpa dukungan masyarakat dan pihak swasta kerja sama sister city/province yang dilaksanakan akan menjadi kurang efektif.

## **2. Kerjasama Internasional Daerah Kota Jambi**

Ekonomi dan perdagangan menjadi isu yang melintasi batas negara. Globalisasi ekonomi melibatkan pergeseran kualitatif ke arah perekonomian dunia yang tidak lagi didasarkan kepada otonomi perekonomian nasional, tetapi lebih didasarkan pada pasar global terkonsolidasi untuk produksi, distribusi, dan konsumsi. Terjadi proses integrasi ke dalam dimana ekonomi global tunggal mendominasi sejumlah perekonomian nasional yang terkandung didalamnya. Berbagai faktor menjadi penyebab kondisi tersebut, diantaranya surplus kapital yang mendorong perluasan investasi di wilayah-wilayah baru yang menjanjikan, baik pasar maupun bahan baku demi surplus lebih lanjut. Globalisasi ekonomi dan perdagangan ditopang oleh ketersediaan infrastruktur, teknologi informasi

dan semakin rendahnya biaya transportasi yang memungkinkan dilakukannya perdagangan lintas batas negara dalam waktu cepat. Akibatnya, ekonomi negara-negara nasional menjadi semakin tergantung satu dengan yang lain dalam lingkup global. Dalam interdependensi ekonomi global ini kebijakan ekonomi satu negara tidak dapat dilepaskan pengaruhnya terhadap negara lain.

Pelibatan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan luar negeri saat ini dimungkinkan dengan adanya transformasi model tata kelola pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi, Pemerintah Daerah di Indonesia dapat bergerak lebih cepat melakukan pembangunan dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh pemda masing-masing. Dengan hak kewenangan yang dimilikinya, Pemda juga dapat membuka akses kerjasama dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri, baik melalui kerjasama dalam bentuk sister city/province maupun bentuk kerja sama lainnya.

Menurut Kepala Bagian Kerjasama Setda Kota Jambi Mariani Yanti, Ph.D terhadap Bentuk Kerjasama Internasional Daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi tidak perlu diragukan lagi. Hal itu menurutnya tidak terlepas dari kerja keras jajaran Pemerintah Kota Jambi yang dimotori Wali Kota Jambi Syarif Fasha dengan konsep *outward looking policy*. Kota Jambi saat ini tercatat sebagai salah satu daerah di Indonesia yang aktif dan memiliki hubungan kemitraan strategis dengan beberapa negara di dunia. Sebut saja seperti Singapura, China, Korsel, Denmark, dan Jerman, yang memiliki kemitraan strategis dan komprehensif bagi Kota Jambi. Kota Jambi juga tercatat aktif dalam beberapa organisasi internasional, seperti UCLG ASPAC dan ICLEI.

Berikut ini beberapa kerja sama Internasional yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi :

1. Berkerja sama dengan Pemerintah Jerman dalam penyiapan program pengelolaan sampah untuk menurunkan emisi Gas Rumah kaca untuk mengatasi pemanasan global dan perubahan iklim. Bantuan senilai 13,4 juta Euro dari Bank Pembangunan Jerman (KFW), bagi pembangunan sanitary landfill di lokasi TPA Talang Gulo.
2. Bekerjasama dengan *Asian Development Bank* (ADB), Kerjasama ini menghasilkan bantuan dana sebesar 625 Milyar Rupiah untuk pembangunan IPAL dengan *Sewerage System* yang ditempatkan di Kecamatan Jambi Timur.

3. Kerja sama pemerintah Kota Jambi dengan Singapura dalam kegiatan Basic English Training. Kegiatan ini diselenggarakan pemerintah Republik Singapura, melalui Singapore Cooperation Programme (SCP), di Kota Jambi. Pelatihan ini di buat untuk ASN, kerja sama kedua negara ini telah rutin dilakukan sejak tiga tahun terakhir. Demi meningkatkan mutu kompetensi serta merubah mindset ASN Jambi, ratusan ASN belajar ke Singapura dan mengikuti SCP secara gratis dan dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah Singapura.
4. Bantuan yang bersumber dari lembaga PBB UN Habitat atau United Nations Human Settlements Programme sebesar US\$ 98.950 untuk penataan kawasan kumuh di Kota Jambi. Sebelumnya UN Habitat telah menggelar konferensi di Indonesia, yakni Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Permukiman dan Pembangunan Berkelanjutan atau The Third of the Preparatory Committee for Habitat III (Prepcom 3 UN HABITAT III) yang diikuti oleh 193 negara. Tim dari UN Habitat juga telah mengunjungi beberapa daerah di Indonesia, termasuk memantau perkembangan permukiman di Kota Jambi dan hasil akhirnya Kota Jambi terseleksi dan mendapatkan bantuan dana.

### **Kesimpulan**

Pemerintah daerah dapat berperan penting membantu suksesnya diplomasi ekonomi melalui jalur paradiplomasi bila ada koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah dan setiap pihak yang terkait. Dengan menguatnya desentralisasi kekuasaan dari pusat ke daerah dan bermunculannya para pemimpin kabupaten/kota dan provinsi yang proaktif melakukan terobosan dalam pembangunan daerahnya, paradiplomasi dapat menjadi bagian kekuatan diplomasi ekonomi Indonesia. Dengan mengasumsikan bahwa economic foreign policy berawal dari kapasitas dan kemampuan domestik suatu negara, maka pemerintah (pusat dan daerah) patut mengupayakan berbagai formulasi kebijakan yang dapat mendorong kesiapan domestik secara menyeluruh. Sejauh ini, kerjasama internasional yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota jambi sudah menunjukkan hasil yang baik. Hal itu dibuktikan dengan beberapa bentuk kerjasama internasional yang sudah dilakukan pemerintah kota jambi sampai saat ini. Namun dibalik kerjasama yang sudah dilakukan pemerintah kota jambi saat ini masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Diantaranya belum maksimalnya tindak lanjut

kerjasama yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota jambi, selain itu juga dampak dari kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah kota belum membawa dampak positif yang besar bagi pembangunan kota jambi. Hal ini dapat ditingkatkan dengan memperbaiki kualitas SDM dan koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat.

### **Daftar Pustaka**

- Cipto, Bambang. (2010). Hubungan Internasional Di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, Dan Masa Depan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dunn, William N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Djelantik, Sukawarsini. (2008). *Diplomasi antara Teori & Praktik*. Jakarta: Graha Ilmu
- Jackson, Robert & Sorensen, Georg. (2009). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Lecours, André. (2008). Political Issues of Paradiplomacy: Lessons from the Developed World, Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael'
- Mukti, Takdir Ali, (2013). Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia, Yogyakarta,
- Morgenthau, Hans J. (2010). *Politik Antarbangsa*. Jakarta: Yayasan Obor
- Mintz, Alex and Karl De Rouen Jr, Understanding Foreign Policy Decision Making, NY: Cambridge University Press, 2010.
- Stefan Wolff, (1972). Paradiplomacy: Scope, Opportunities and Challenges, [www.stefanwolff.com/files/Paradiplomacy.pdf](http://www.stefanwolff.com/files/Paradiplomacy.pdf). diakses 30 Maret 2015. Davis, k, Human behavior at work: Human Relation Organization Behavior. Mc Graw-Hill New York.
- Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah, Jakarta: Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya, Kementerian Luar Negeri, 2006.
- Winarno, Budi. (2014). *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS Rosdakarya.
- Sztompka, Piotr, (2004). Sosiologi Perubahan Sosial. Terj. Alimandan dari "The Sociology of Social Change". Jakarta: Prenada.
- Stiglitz, J.E. (2002). Globalization and its discontents. New York: W.W. Norton.
- Winarno, Budi. (2014). *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS